

## **IMPLIKASI EKONOMI DARI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH: STUDI KASUS DI KABUPATEN MAHAKAM ULU DALAM PERSPEKTIF RUMAH TANGGA DAN FISKAL DAERAH**

Eka Budi Hertanto<sup>1</sup>, Sindora Walici K<sup>2</sup>, Haryono<sup>3</sup>, Libseawasa Zakipradi<sup>4</sup>, Widyatmike Gede Mulawaman<sup>5</sup>, Usfandi Haryaka<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Mulawarman

[exxa92@gmail.com](mailto:exxa92@gmail.com)<sup>1</sup>, [swalicik@gmail.com](mailto:swalicik@gmail.com)<sup>2</sup>, [yonoh052@gmail.com](mailto:yonoh052@gmail.com)<sup>3</sup>, [asa.rays@gmail.com](mailto:asa.rays@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[widyatmike@fkip.unmul.ac.id](mailto:widyatmike@fkip.unmul.ac.id)<sup>5</sup>, [usfandi.haryaka@fkip.unmul.ac.id](mailto:usfandi.haryaka@fkip.unmul.ac.id)<sup>6</sup>

### **Abstract**

*This study aims to analyze the economic implications of the free education policy at the elementary and secondary school levels in Mahakam Ulu Regency, East Kalimantan Province, from a household and regional fiscal perspective. Using a qualitative descriptive approach based on case studies, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation studies of the policy's implementation and its impact in the 3T (underdeveloped, frontier, and outermost) areas. The results show that the free education policy is able to reduce household expenditure burdens, especially for economically disadvantaged groups, and encourage a shift in spending to productive sectors. However, indirect costs such as school supplies and transportation remain a significant burden. From a regional fiscal perspective, delays in fund disbursement, limited budget flexibility, and low school managerial capacity are major obstacles to the policy's effectiveness. In addition, gaps in educational infrastructure, unequal distribution of teachers, and low public literacy regarding the policy's limitations also hinder the optimization of its benefits. These findings emphasize the importance of further policy interventions in the form of increased budget allocation, strengthened oversight, public education, and capacity building for educational institutions. This research provides theoretical and practical contributions to the study of the economics of education, particularly in the context of 3T regions, and recommends evidence-based policies that support inclusive and sustainable human resource development.*

**Keywords:** Free Education, Economic Implications, Households, Regional Fiscal, Mahakam Ulu, 3T Region.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi ekonomi dari kebijakan pendidikan gratis pada jenjang Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, dengan meninjau dari perspektif rumah tangga dan fiskal daerah. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan kebijakan serta dampaknya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis mampu mereduksi beban pengeluaran

rumah tangga, khususnya bagi kelompok masyarakat ekonomi lemah, serta mendorong pergeseran belanja ke sektor produktif. Namun, biaya tidak langsung seperti perlengkapan sekolah dan transportasi masih menjadi beban signifikan. Dari sisi fiskal daerah, keterlambatan pencairan dana, keterbatasan fleksibilitas anggaran, serta rendahnya kapasitas manajerial sekolah menjadi kendala utama dalam efektivitas kebijakan. Selain itu, kesenjangan infrastruktur pendidikan, ketimpangan distribusi guru, dan rendahnya literasi masyarakat terhadap batasan kebijakan turut menghambat optimalisasi manfaatnya. Temuan ini menekankan pentingnya intervensi kebijakan lanjutan berupa peningkatan alokasi anggaran, penguatan pengawasan, edukasi publik, serta pengembangan kapasitas kelembagaan pendidikan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam kajian ekonomi pendidikan, khususnya dalam konteks wilayah 3T, serta merekomendasikan kebijakan berbasis bukti yang mendukung pembangunan sumber daya manusia secara inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pendidikan Gratis, Implikasi Ekonomi, Rumah Tangga, Fiskal Daerah, Mahakam Ulu, Wilayah 3T.

## **A. PENDAHULUAN**

Pendidikan memiliki peran sentral sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing serta berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, investasi di sektor pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, serta memperkuat daya saing bangsa di tingkat global (Todaro & Smith, 2020). Hal ini selaras dengan amanat konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kendati demikian, sistem pendidikan nasional Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar, terutama terkait dengan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai salah satu wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), mencerminkan problematika tersebut. Ketimpangan ini tercermin dari belum meratanya distribusi fasilitas pendidikan, keterbatasan infrastruktur dasar, serta rendahnya akses terhadap teknologi informasi di daerah tertinggal dan terpencil. Keterbatasan tersebut secara langsung berdampak pada proses pembelajaran dan hasil pendidikan yang kurang optimal (Juventia & Yuan, 2024). Di samping itu, kurangnya sumber daya, fasilitas yang tidak

memadai, dan distribusi guru yang tidak merata di beberapa daerah menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan antar daerah (Zakaria, 2022). Faktor ekonomi keluarga juga menjadi penghambat signifikan terhadap akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 25,22 juta penduduk Indonesia atau 9,36 persen dari total populasi berada dalam garis kemiskinan, dengan mayoritas mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka (Statistik, 2024).

Dalam implementasinya di sekolah, manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah (Budaya, 2016). Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi sangat penting posisinya untuk diaplikasikan karena secara normatif dan sosiologis entitas sekolah bukanlah lembaga yang bersifat profit di mana memberikan tanggung jawab kepada masyarakat atau setiap orang tua/wali siswa, di mana setiap penerimaan lembaga pendidikan harus digunakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan yang profesional. Hal tersebut dilandasi: (a) adanya tuntutan untuk mampu mengelola penggunaan dana secara transparan dan akuntabel, (b) meningkatkan efektivitas dan efisien biaya, (c) meminimalkan penyalahgunaan dana yang dihimpun, (d) kreatif menggali sumber-sumber pendanaan, dan (e) menempatkan bendahara yang kompeten dan profesional (Komariah, 2018). Selain itu meningkatnya tuntutan mutu pendidikan di tengah keterbatasan anggaran menjadikan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana sekolah menjadi isu krusial (Hamini, 2025)

Menanggapi problematika tersebut, Pemerintah Indonesia telah merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan afirmatif, salah satunya berupa penyelenggaraan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus hambatan biaya sebagai penghalang utama partisipasi pendidikan, serta sebagai instrumen pemerataan kesempatan belajar yang lebih adil dan inklusif. Kebijakan ini tidak hanya menunjukkan komitmen negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara atas pendidikan yang layak, tetapi juga mengandung implikasi ekonomi yang substansial terhadap struktur pengeluaran rumah tangga dan pembangunan SDM nasional.

Secara teknis, kebijakan pendidikan gratis didukung oleh pembiayaan publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendanaan operasional pendidikan diwujudkan melalui skema Dana Bantuan

Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang dialokasikan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan MA yang bersumber dari APBN, sementara Bantuan Operasional Daerah atau BOSDA dibiayai melalui APBD masing-masing pemerintah daerah. Alokasi dana Bantuan Operasional tiap sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa dan kebutuhan dasar operasional pendidikan. Implikasi ekonomi dari kebijakan ini sangat signifikan: tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga dalam hal biaya pendidikan, tetapi juga memungkinkan terjadinya pergeseran alokasi belanja rumah tangga ke sektor lain yang produktif, serta mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, kebijakan ini berkontribusi terhadap penguatan modal manusia (*human capital*) yang menjadi aset utama pembangunan ekonomi nasional. Di sisi lain, efektivitas implementasi BOSP juga menentukan efisiensi fiskal daerah serta ketahanan pembiayaan sektor pendidikan secara nasional.

Program wajib belajar 12 tahun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 menjadi kerangka normatif dalam perluasan akses pendidikan nasional (Kusuma et al., 2024). Namun, implementasi kebijakan pendidikan gratis tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Aiska yang berjudul Implementasi kebijakan pendidikan gratis di kota Blitar telah teridentifikasi beberapa persoalan utama, seperti ketidakseimbangan alokasi anggaran, lemahnya sistem pengawasan pengelolaan dana BOSP, serta rendahnya literasi masyarakat terkait cakupan dan batasan kebijakan pendidikan gratis (Aiska, 2017). Kesalahpahaman masyarakat sering kali memunculkan ekspektasi bahwa seluruh komponen pendidikan dibiayai oleh negara, padahal sejumlah kebutuhan seperti seragam, buku pelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler masih dibebankan kepada orang tua (Wolio et al., 2021).

Temuan serupa juga diperoleh oleh Kramer et al. (2024) yang meneliti efektivitas kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Mereka menyimpulkan bahwa meskipun terjadi peningkatan angka partisipasi siswa, tantangan dalam pengalokasian anggaran dan keterbatasan fasilitas pendidikan masih menjadi hambatan utama. Hasil temuan lainnya menunjukkan bahwa dana yang disediakan pemerintah melalui program BOSP dan PIP belum mencukupi untuk menutupi seluruh biaya pendidikan, khususnya bagi siswa berkebutuhan khusus. Orang tua masih harus menanggung biaya tambahan, seperti seragam, buku, dan transportasi. Dengan demikian, meskipun kebijakan pendidikan bebas biaya telah diterapkan, peningkatan alokasi anggaran sangat diperlukan guna memastikan bahwa seluruh anak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, dapat mengakses pendidikan yang

bermutu tanpa menghadapi beban finansial (Kramer et al., 2024). Lidda et al. (2022) berdasarkan hasil penelitiannya menekankan bahwa penghapusan biaya pendidikan hanya mencakup aspek pembelajaran inti dan tidak menjangkau seluruh kebutuhan pembelajaran siswa, sehingga komponen biaya tambahan tetap menjadi beban bagi keluarga (Lidda, 2022).

Secara umum, kendala implementatif pendidikan gratis berkisar pada keterbatasan pendanaan, rendahnya kapasitas manajerial sekolah dalam mengelola dana Bantuan operasional sekolah, serta kesenjangan infrastruktur antardaerah. Hasil studi Muhdi et al. (2017) menunjukkan bahwa keterbatasan dana operasional sering kali memaksa satuan pendidikan untuk mencari sumber pendanaan alternatif guna menutupi kekurangan kebutuhan yang tidak diakomodasi dalam BOS (Muhdi et al., 2017).

Dengan demikian, untuk memperkuat efektivitas kebijakan pendidikan gratis dalam perspektif ekonomi, diperlukan upaya strategis berupa optimalisasi alokasi anggaran, penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kapasitas manajerial sekolah, serta edukasi publik mengenai ruang lingkup kebijakan tersebut. Implikasi ekonomi dari kebijakan pendidikan gratis bukan hanya sebatas pengurangan beban biaya keluarga, tetapi juga menyangkut efisiensi fiskal, pergeseran struktur pengeluaran rumah tangga, dan investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM unggul yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Penelitian ini penting dilakukan karena kebijakan pendidikan gratis di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meskipun telah diterapkan secara nasional, masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya, terutama di daerah tertinggal seperti Kabupaten Mahakam Ulu. Ketimpangan akses, keterbatasan infrastruktur, distribusi guru yang tidak merata, serta alokasi dana operasional yang belum mencukupi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Dalam konteks ini, studi ini memiliki signifikansi untuk menelaah secara komprehensif implikasi ekonomi dari kebijakan pendidikan gratis terhadap beban pengeluaran rumah tangga, efektivitas penggunaan anggaran publik, serta kontribusinya dalam penguatan pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi pendidikan dengan pendekatan kontekstual yang relevan untuk wilayah 3T. Temuan dari studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan intervensi fiskal di sektor pendidikan seperti pembiayaan pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan

yang memadai, mendorong efisiensi anggaran, dan memastikan bahwa seluruh peserta didik, terutama dari keluarga kurang mampu, dapat mengakses pendidikan bermutu tanpa menghadapi beban finansial yang berlebihan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berperan dalam menjawab persoalan teknis pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dalam mendukung pencapaian tujuan konstitusional dan pembangunan nasional yang inklusif serta berkelanjutan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus untuk mendalami secara kontekstual dinamika implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Mahakam Ulu, sebuah wilayah yang termasuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pemilihan pendekatan ini dilandaskan pada tujuan utama penelitian, yakni mengeksplorasi dan memahami secara mendalam implikasi ekonomi dari kebijakan pendidikan gratis terhadap struktur pengeluaran rumah tangga serta efisiensi fiskal daerah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan latarbelakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan banyak metode yang ada dalam penelitian kualitatif (Syahrizal & Jailani, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dalam konteks alamiah yang memungkinkan eksplorasi yang lebih luas dan mendalam. Penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman makna dan interpretasi terhadap realitas sosial yang terjadi secara alamiah, dengan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen (Creswell, n.d.). Penelitian kualitatif juga dinilai efektif untuk mengeksplorasi isu-isu kompleks dalam kebijakan publik dan pendidikan, karena mampu menangkap nuansa sosial-budaya serta interaksi antarpemangku kepentingan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif (Aspers & Corte, 2019). Dengan demikian, pendekatan ini sangat relevan digunakan untuk menelaah implikasi ekonomi kebijakan pendidikan gratis secara lebih luas dan mendalam, khususnya dalam konteks wilayah tertinggal seperti Kabupaten Mahakam Ulu. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: Wawancara mendalam dengan informan kunci seperti kepala sekolah, guru, orang tua siswa, pejabat dinas pendidikan, dan pengelola keuangan daerah untuk memperoleh perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, observasi partisipatif terhadap kondisi sekolah, distribusi fasilitas, dan pelaksanaan program BOSP/PIP di lapangan, dan studi

dokumentasi, yang mencakup dokumen APBD/APBN terkait pendidikan, laporan realisasi BOSP dan BOSDA, data BPS tentang kemiskinan dan pendidikan, serta regulasi pendidikan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan serta kapasitas informatif dalam menjelaskan dampak ekonomi kebijakan pendidikan gratis. Jumlah informan disesuaikan hingga tercapai saturasi data (data saturation), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak ada temuan baru yang signifikan (Guest et al., 2020).

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik ala Braun dan Clarke (2006), yang mencakup proses transkripsi, pengkodean (semantic dan latent), pengkategorian ke dalam tema, dan identifikasi pola makna dalam perspektif teoritik dan empiris (Braun & Clarke, 2006). Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, serta dilakukan member checking untuk memastikan keakuratan interpretasi peneliti terhadap hasil wawancara.

Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menangkap secara utuh bagaimana kebijakan pendidikan gratis memberi pengaruh terhadap beban ekonomi rumah tangga, efektivitas fiskal daerah, serta tantangan dan peluang dalam implementasinya di daerah tertinggal.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implikasi ekonomi dari kebijakan pendidikan gratis di Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten Mahakam Ulu dalam perspektif rumah tangga dan fiskal daerah

#### **1. Reduksi Beban Pengeluaran Rumah Tangga**

Hasil temuan dari wawancara mendalam dengan orang tua siswa di Mahakam Ulu menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis membawa dampak langsung dalam mengurangi beban pengeluaran rutin rumah tangga, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Biaya yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar SPP, buku pelajaran, dan kegiatan sekolah kini dapat dialihkan untuk kebutuhan konsumsi dasar maupun investasi produktif rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2020) yang menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi strategis dalam pembangunan modal manusia, yang menghasilkan peningkatan produktivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi empiris, studi terhadap program pembayaran bantuan pendidikan di Amerika Serikat menemukan bahwa setiap dolar bantuan yang diberikan berpotensi memicu peningkatan aktivitas ekonomi lokal sebesar 2,4

kali lipat, yang menegaskan bahwa penghapusan biaya pendidikan tidak hanya meringankan beban langsung keluarga, tetapi juga menghasilkan efek potensi ekonomi yang berlipat-lipat (Todaro & Smith, 2020).

Namun, sebagian besar responden mengindikasikan bahwa biaya tambahan seperti seragam, alat tulis, dan transportasi sekolah masih ditanggung oleh orang tua. Dengan demikian, meskipun kebijakan pendidikan gratis secara formal menghapus pungutan utama, beban finansial tetap ada dalam bentuk pengeluaran tidak langsung. Temuan ini mendukung studi Kramer et al. (2024) yang menegaskan bahwa biaya nonakademik menjadi komponen pengeluaran signifikan yang mempengaruhi partisipasi siswa dari keluarga miskin (Kramer et al., 2024).

## **2. Efektivitas Pendanaan Publik dan Alokasi Fiskal Daerah**

Dari perspektif fiskal daerah, alokasi anggaran pendidikan melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Mahakam Ulu belum sepenuhnya optimal. Hasil analisis dokumen APBD serta wawancara dengan pengelola sekolah mengindikasikan bahwa keterlambatan pencairan/pengambilan dana dan terbatasnya fleksibilitas dalam penggunaan anggaran menjadi hambatan signifikan dalam memenuhi kebutuhan operasional harian sekolah. Dalam praktiknya, beberapa sekolah bahkan terpaksa menunda pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau mencari alternatif sumber dana, seperti dukungan dari masyarakat, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) lokal, atau swadaya melalui komite sekolah. Temuan ini sejalan dengan laporan *The SMERU Research Institute* (2021) yang menunjukkan bahwa dalam implementasi Program BOS, masih terdapat tantangan serius, termasuk rendahnya tingkat partisipasi orang tua di sekolah, keterlambatan pencairan dana, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya jumlah dana yang diterima per siswa.

Temuan ini memperkuat kajian Muhdi, Rachmadtullah, & Sumantri (2017) yang menyoroti bahwa kelemahan dalam desain dan implementasi manajemen keuangan sekolah dapat berdampak pada efisiensi fiskal dan menurunkan kualitas pendidikan (Muhdi et al., 2017). Khoirunnisah et al. (2024) menambahkan bahwa efektivitas manajemen keuangan sekolah sangat bergantung pada perencanaan anggaran yang matang, sistem pengawasan internal yang kuat, dan pelaporan yang transparan serta akuntabel (Khoirunnisah et al., 2024).

Yadi dan Mursalin (2025) juga menekankan bahwa ketergantungan sekolah pada Dana BOS perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas manajerial kepala sekolah dalam mengelola

keuangan secara strategis, termasuk dalam mengeksplorasi sumber-sumber pendanaan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Yadi & Mursalin, 2025). Senada, Pujiharti (2023) dalam Jurnal *An Nahdliyah* menekankan bahwa pengelolaan keuangan sekolah yang efektif menjadi faktor penting yang menopang kelancaran program belajar dan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Pujiharti, 2023). Keterbatasan infrastruktur dan logistik di daerah 3T seperti Mahakam Ulu menuntut pendekatan fiskal yang lebih responsif dan adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Pendekatan kebijakan fiskal yang terdesentralisasi belum sepenuhnya mampu mengatasi beragam kebutuhan pendidikan di daerah perbatasan. Karena itu, perlu ada penguatan dalam pengelolaan keuangan pendidikan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, pendampingan teknis dan pelatihan rutin dalam manajemen keuangan sekolah penting dilakukan agar kebijakan pendidikan gratis benar-benar bisa meningkatkan akses dan mutu pendidikan, bukan hanya dalam hal administratif, tetapi juga secara nyata.

### **3. Kesenjangan Kualitas dan Ketersediaan Layanan Pendidikan**

Meskipun kebijakan pendidikan gratis bertujuan sebagai instrumen pemerataan akses, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur dan sumber daya pendidikan tetap menjadi penghalang utama pencapaian hasil belajar yang berkualitas. Observasi langsung di beberapa sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP) mengungkapkan minimnya ketersediaan ruang kelas layak, sarana TIK, serta akses internet yang sangat terbatas. Dalam konteks wilayah 3T, menegaskan bahwa kondisi sarana-prasarana yang tidak memadai menyebabkan mutu layanan pendidikan menjadi tidak optimal. Temuan lainnya menyebutkan bahwa sebagian besar guru juga merangkap tugas administrasi karena kurangnya tenaga kependidikan.

Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kualitas pembelajaran dan rendahnya motivasi belajar siswa. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan distribusi guru yang proporsional. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhuda, Ardeliana, dan Bustomi (2024) menemukan bahwa ketimpangan distribusi tenaga pendidik, baik guru maupun kepala sekolah, dapat berdampak pada kualitas pendidikan (Nurhuda et al., 2024). Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis perlu disertai dengan intervensi kebijakan tambahan seperti afirmasi anggaran infrastruktur, pelatihan guru, dan peningkatan kapasitas manajerial sekolah.

#### **4. Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Pendidikan Gratis**

Aspek lain yang terungkap dari hasil penelitian ini adalah rendahnya literasi kebijakan di kalangan masyarakat. Banyak orang tua menganggap bahwa seluruh aspek pendidikan termasuk ekstrakurikuler, perlengkapan sekolah, dan kegiatan perpindahan harus ditanggung pemerintah. Persepsi ini menimbulkan konflik antara pihak sekolah dan wali murid saat terjadi pungutan sukarela. Hasil ini menguatkan temuan Aiska (2017) dan Wolio et al. (2021) bahwa ambiguitas dalam pemahaman masyarakat dapat mengganggu hubungan komunikasi dan akuntabilitas sekolah (Wolio et al., 2021).

Untuk itu, transparansi pengelolaan dana dan sosialisasi kebijakan perlu ditingkatkan melalui media yang relevan dan mudah diakses, terutama di daerah terpencil. Edukasi publik mengenai batasan dan cakupan kebijakan pendidikan gratis menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan sosial dan akuntabilitas layanan pendidikan.

#### **5. Implikasi Jangka Panjang terhadap Penguatan SDM dan Ekonomi Daerah**

Secara konseptual, pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal. Di Mahakam Ulu, meskipun implementasi kebijakan pendidikan gratis masih menghadapi tantangan, adanya pengurangan beban biaya dan peningkatan angka partisipasi pendidikan menunjukkan arah perubahan positif. Ke depan, apabila kualitas layanan pendidikan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, maka kontribusinya terhadap pembentukan modal manusia yang produktif akan semakin signifikan.

Temuan ini konsisten dengan perspektif pembangunan ekonomi berbasis SDM (Todaro & Smith, 2020), di mana pendidikan yang inklusif dan terjangkau akan menghasilkan tenaga kerja terampil yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam konteks wilayah tertinggal dan perbatasan (Todaro & Smith, 2020).

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Mahakam Ulu membawa implikasi ekonomi yang signifikan, baik pada tingkat rumah tangga maupun fiskal daerah. Secara umum, kebijakan ini telah berhasil mengurangi beban pengeluaran pendidikan bagi masyarakat, khususnya pada kelompok ekonomi lemah. Namun demikian, masih terdapat biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh orang tua, seperti

perlengkapan sekolah dan transportasi, yang dapat menghambat akses pendidikan secara optimal.

Dari sisi pengelolaan fiskal, keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan fleksibilitas penggunaan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah dalam menjalankan operasional pendidikan. Hal ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan dan kualitas layanan pendidikan. Disparitas sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya literasi kebijakan di kalangan masyarakat, serta ketimpangan distribusi guru turut memperkuat fakta bahwa kebijakan pendidikan gratis masih memerlukan penguatan secara sistemik dan kontekstual.

Secara jangka panjang, kebijakan ini berpotensi menjadi instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi daerah. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aiska, I. . (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kota Blitar. *Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(8), 45–60.
- Aslindah, A., & Mulawarman, W. G. (2022). Membangun Masa Depan Melalui Manajemen Keuangan Pendidikan yang Efektif. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 2(2), 65–74. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v2i2.2606>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell. (n.d.). *Creswell (2007) 35-52 Qualitative Research Design.pdf* (p. 2007).
- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLoS ONE*, 15(5), 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Hamini, Mulawarman, W. G., & Haryaka, U. (2025). Smart Budgeting for Future-Ready Schools: Strategies for Efficiency and Financial Accountability in Education Funding. *Journal of Pedagogy and Education Science*, 4(02), 259–273. <https://doi.org/10.56741/IISTR.jpes.00964>

- Juventia, D., & Yuan, S. A. (2024). Ketimpangan Sosial Dalam Bidang Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(1), 418–427. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2335>
- Khoirunnisah, F., Aulia, R., Kusumaningrum, H., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2024). *Efisiensi dan Efektifitas dalam Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan*.
- Kramer, P., Application, T. H. E. R., & Bantul, N. I. N. (2024). *Edunity EDUCATION LAW AND THE REALITY APPLICATION AND NEEDS IN BANTUL*. 3(10), 941–951.
- Kusuma, J. W., Hamidah, H., Umalihatyati, U., & Rini, P. P. (2024). Mengurai Benang Kusut Kebijakan Pendidikan Indonesia: Sebuah Literature Review Analitik. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1810–1826. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2772>
- Lidda. (2022). *Implementasi Program Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malunda (SMPN 4 Malunda) Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene*. 1–23.
- Muhdi, M., Kastawi, N. S., & Widodo, S. (2017). Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 135. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p135-145>
- Nurhudaya, R. P., Ardeliana, L., & Bustomi, I. (2024). *Analisis Distribusi Kepala Sekolah Dan Guru : Studi Kasus Pada Provinsi DKI Jakarta , Jawa Barat , Kalimantan Selatan Dan Papua Tahun 2023 / 2024 DATA*. 2(6), 954–959.
- Pujiharti, E. S. (2023). Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah / Madrasah. *An Nadhliyah Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 37–52.
- Statistik, B. P. (2024). *Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*. 16, 1–2. <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/9c24f43365d1e41c8619dfe4/pe-nghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-indonesia-tahun-2021.html>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Issue 13th Edition). <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- Wolio, A., Saidah, U., & Rajab, L. (2021). Hubungan Implementasi Biaya Pendidikan Gratis. *PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology*, 1(1), 12–26.

Yadi, R., & Mursalin, M. (2025). *Peran Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Meningkatkan*. 4(4), 6813–6817.

Zakaria, M. (2022). Dualisme Pendidikan Kegelisahan Akademik Profesi. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 20(2), 45–62.  
<https://doi.org/10.37216/tadib.v20i2.724>.